

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasca-kemerdekaan Indonesia, lanskap politik nasional mengalami transformasi fundamental yang menuntut penyesuaian peran dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Pada masa penjajahan, gerakan Islam umumnya memfokuskan diri pada bidang pendidikan, dakwah, serta perlawanan antikolonial. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan diraih, ormas-ormas keagamaan dihadapkan pada realitas baru untuk merespons dinamika pembentukan identitas negara dan konsolidasi kekuasaan. Keterlibatan ormas keagamaan dalam ruang politik kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan, mengingat perdebatan mengenai dasar konstitusi dan arah ideologi negara menuntut mereka untuk ikut campur secara langsung demi memastikan ruang bagi nilai-nilai agama di dalam tatanan sistem negara yang baru lahir.¹

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu representasi paling menonjol dari transformasi organisasi keagamaan yang berevolusi menjadi kekuatan politik. Sejak didirikan pada tahun 1926 di Surabaya oleh para ulama tradisional seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syansuri, NU memiliki akar yang kuat di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial melalui jaringan pesantrennya. Meskipun berangkat dari misi utama merawat ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, soliditas massa akar rumput dan kepatuhan kepada para ulama pada akhirnya menjadikan NU bukan sekadar *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan) semata. NU kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan politik nasional yang memiliki peran strategis dalam merespons dinamika politik Indonesia.²

Peran politik Nahdlatul Ulama (NU) semakin memperoleh ujian ketika Indonesia memasuki dekade 1950-an, yaitu pada masa berlakunya sistem

¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 112-114.

² Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Bisma Tiga Belas, 1999).

Demokrasi Liberal yang ditandai oleh tingginya tingkat instabilitas politik. Penerapan sistem parlementer menyebabkan kabinet silih berganti dalam waktu yang relatif singkat sebagai akibat dari rapuhnya koalisi pemerintahan serta menguatnya polarisasi ideologis di antara partai-partai politik. Di tengah dinamika tersebut, Pemilihan Umum 1955 diselenggarakan sebagai pemilu demokratis pertama di Indonesia yang menjadi tolok ukur kekuatan politik nasional sekaligus mencerminkan konfigurasi dukungan masyarakat terhadap berbagai partai politik. Meskipun pelaksanaan pemilu berlangsung relatif sukses, keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh tercapainya konsensus dalam sidang Konstituante. Perdebatan yang berkepanjangan mengenai dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar yang baru akhirnya menyebabkan forum tersebut mengalami kebuntuan politik (*deadlock*), sehingga gagal menjalankan amanat konstitusional yang dibebankan kepadanya.³

Di tengah pusaran sistem politik 1950-an yang tidak menentu, Nahdlatul Ulama mengambil langkah ijtihad politik radikal dengan memisahkan diri dari partai Masyumi pada Mukhtar ke-19 di Palembang tahun 1952, dan secara resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik mandiri. Keputusan besar ini membawa konsekuensi fundamental pada struktur internal, di mana Mukhtar yang sejak awal berdirinya pada 1926 disebut "Congres Nahdlatul Ulama" oleh Hoof Bestuur Nahdlatul Ulama (HBNO) semakin dikukuhkan fungsinya sebagai forum permusyawaratan dan pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Sebagai ajang krusial bertemunya para kiai, ulama, dan elite pengurus, segala bentuk manuver partai, penentuan sikap politik, hingga resolusi konflik internal diselesaikan secara mutlak melalui forum ini.⁴ Lebih dari sekadar arena politik, Mukhtar tetap mempertahankan fungsi esensial keorganisasian dan keagamaannya, seperti bahtsul masail (pembahasan hukum Islam), penyampaian laporan pertanggungjawaban, perumusan strategi, penetapan AD/ART, hingga

³ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962). Referensi klasik mengenai instabilitas kabinet era Demokrasi Parlementer dan kegagalan Konstituante.

⁴ Agung. *Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Jawa Barat 1926–1945* (Tesis, Universitas Padjadjaran). Universitas Padjadjaran Repository. 2017 hlm. 114

pemilihan pengurus baru. Seiring dengan pergeseran peran NU menjadi partai politik yang membutuhkan konsolidasi lebih terencana, dinamika forum ini pun ikut menyesuaikan diri; istilah "kongres" secara resmi diganti menjadi "muktamar" sejak tahun 1946, dan siklus penyelenggaraannya yang semula setiap tahun diubah menjadi tiga tahun sekali (berlaku pada periode 1946–1960) untuk mengakomodasi beban organisasi yang semakin kompleks.⁵

Krisis yang melanda Demokrasi Liberal akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1959. Kegagalan sistem parlementer direspons oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945, sekaligus menandai lahirnya era Demokrasi Terpimpin. Di bawah sistem baru ini, Soekarno mengkonsolidasikan kekuasaannya, membangun poros NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis), dan secara proaktif mendekati ormas Islam, termasuk NU. Kondisi ini menempatkan Partai NU pada posisi yang sangat dilematis di satu sisi, menyetujui tawaran Soekarno berarti harus bersedia berdampingan dan berkompromi secara politik dengan kekuatan komunis yang berseberangan secara ideologis, namun di sisi lain, menolaknya berisiko membuat NU tersingkir dari pusaran kekuasaan.⁶

Merespons tekanan dan perubahan sistemik tersebut, Muktamar ke-22 NU yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Desember 1959 menjadi forum pengambilan keputusan yang sangat menentukan. Forum ini bukan sekadar agenda pergantian pengurus, melainkan sebuah arena pertarungan wacana yang mempertaruhkan eksistensi arah perjuangan partai ke depan. Sebagaimana dicatat oleh Greg Fealy, dinamika internal memanas akibat tarik-ulur yang kuat antara kubu "politisi" yang pragmatis untuk mempertahankan porsi kabinet, dengan kubu "ulama" yang berpegang teguh pada prinsip kemandirian basis pesantren. Pergulatan keras dalam merumuskan ijtihad politik untuk menghadapi realitas

⁵ Sulaeman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU, jilid 1* (Surabaya: Khalista, 2007) hlm. 78-79, lihat juga lampiran 1

⁶ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 65-68.

Demokrasi Terpimpin inilah yang menjadikan Mukhtamar ke-22 sebagai titik persimpangan paling kritis bagi partai.⁷

Meskipun kiprah politik NU pada masa Orde Lama telah banyak dikaji, skripsi ini memiliki kebaruan (novelty) dan distingsi yang jelas dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Kajian-kajian sebelumnya umumnya menggunakan perspektif historis makro untuk menyoroti perjalanan politik NU sepanjang dekade 1950-an, atau berfokus pada dinamika pemisahan dari Masyumi dan keberhasilan elektoral pada Pemilu 1955. Berbeda dengan perspektif tersebut, skripsi ini memusatkan perhatian secara spesifik dan mikrohistoris pada dinamika Mukhtamar ke-22 tahun 1959. Fokus yang lebih spesifik ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara lebih mendalam perdebatan faksional, argumentasi teologis, serta dinamika sosiologis elite NU ketika dihadapkan pada tuntutan penyesuaian politik terhadap rezim yang semakin bersifat otoriter.⁸

Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika Mukhtamar ke-22 ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk diangkat. Skripsi ini tidak hanya berfungsi mengisi kekosongan historiografi mengenai episode transisi yang paling krusial bagi kelangsungan eksistensi politik NU, tetapi juga memberikan sumbangsih pemahaman tentang bagaimana sebuah institusi Islam merumuskan kompromi pragmatis di persimpangan jalan sejarah. Signifikansi dari kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan reflektif untuk memahami akar dari fiqh siyasah (politik hukum Islam) khas Nahdliyin sebuah strategi fleksibilitas politik yang tetap menjadikan agama sebagai panduan moral yang terus relevan dalam konstelasi perpolitikan modern di Indonesia.⁹

⁷ Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 150-155.

⁸ KH. Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren* (Bandung: PT Alma'arif, 1977).

⁹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003). Buku ini merupakan rujukan utama mengenai polarisasi internal faksi ulama dan politisi di tubuh Partai NU menjelang Dekrit Presiden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terfokus, penulis menetapkan sejumlah rumusan masalah sebagai batasan kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika dan Teknis Pelaksanaan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-22 ?
2. Bagaimana Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-22 Tahun 1959 ?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan fokus pada hal-hal berikut tujuan penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Dinamika dan Teknis Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-22.
2. Untuk Mengetahui Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-22 Tahun 1959.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian sejarah umumnya tidak dimulai dari awal, melainkan dari tema dan masalah yang telah diteliti oleh sejarawan sebelumnya. Para sejarawan tersebut mewariskan pengetahuan yang nantinya akan ditelaah oleh sejarawan berikutnya melalui berbagai bacaan. Oleh karena itu, penting bagi sejarawan untuk memanfaatkan penelitian pendahulunya sebagai sumber informasi yang relevan. Untuk memperkuat penelitian ini, dilakukanlah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut bertujuan untuk membedakan topik penelitian yang sedang dikaji dengan topik-topik penelitian sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

1. Anggi Muhammad Adha, (2020) KEBIJAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA MENGENAI DASAR NEGARA 1945-

Dalam penelitiannya, Adha menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan ini menempatkan penelitian dalam kerangka sejarah politik makro, yang bertujuan menelusuri proses perubahan pandangan NU secara longitudinal selama kurun waktu hampir empat dekade. Pembahasan dimulai dengan latar belakang historis perdebatan antara Islam dan nasionalisme sejak sidang BPUPKI hingga Konstituante (1956–1959), di mana NU berada dalam barisan partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945, perdebatan tersebut berhenti secara politis dan menjadi titik awal perubahan sikap NU terhadap dasar negara. Adha menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, NU mengalami pergeseran ideologis yang signifikan. Jika pada awalnya NU bersikap keras memperjuangkan dasar Islam, maka pada masa pemerintahan Soeharto sikap itu berubah menjadi lebih moderat dan kompromistis. Perubahan tersebut mencapai puncaknya dalam Munas Alim Ulama 1983 dan Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, ketika NU secara resmi menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Menurut Adha, keputusan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni tekanan politik dari pemerintah Orde Baru dan munculnya generasi baru intelektual NU seperti KH. Achmad Siddiq, KH. Ali Yafie, dan KH. Sahal Mahfudh yang berpandangan pluralis serta menekankan substansi nilai-nilai Islam, bukan formalitas negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan proses transformasi NU dari organisasi politik menuju organisasi sosial-keagamaan yang adaptif terhadap konteks politik dan ideologi negara.

2. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003)

Relevansi penelitian Fealy terhadap penelitian ini terletak pada kesamaan tema besar, yaitu pembahasan mengenai posisi dan sikap politik NU dalam

menghadapi perubahan arah politik nasional pada masa Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin. Pandangan Fealy yang menekankan bahwa tindakan politik NU bersumber dari ijtihad kolektif para ulama memberikan kerangka teoritis yang mendukung pemahaman terhadap dinamika yang terjadi dalam Muktamar ke-22 di Jakarta tahun 1959. Dalam muktamar tersebut, para tokoh NU juga dihadapkan pada dilema politik yang sama, yaitu bagaimana menjaga konsistensi nilai-nilai Islam di tengah tekanan politik nasional yang semakin mengarah pada sentralisasi kekuasaan di bawah Presiden Soekarno. Dengan demikian, gagasan Fealy membantu menjelaskan latar belakang ideologis dan spiritual dari sikap politik NU yang muncul dalam muktamar tersebut.¹⁰

Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian Fealy dan penelitian ini. Fealy menulis dengan cakupan waktu yang luas, yaitu antara tahun 1952 hingga 1967, dengan pendekatan makro terhadap pola hubungan antara elite NU dan kekuasaan negara. Ia berfokus pada analisis ideologis dan politik jangka panjang yang melibatkan berbagai peristiwa penting, seperti keluarnya NU dari Masyumi dan keterlibatannya dalam politik praktis. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada satu peristiwa penting, yakni Muktamar ke-22 Partai Nahdlatul Ulama tahun 1959 di Jakarta, sebagai titik fokus untuk menelusuri bagaimana NU secara institusional memberikan respons terhadap perubahan sistem politik nasional dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin.

3. H. Solaeman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi Nu Jilid 1*, (Surabaya: Khalista 2007)

Nahdlatul Ulama (NU) sejak awal berdirinya pada tahun 1926 telah menempatkan dirinya sebagai organisasi keagamaan yang memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat. Dalam Antologi NU dijelaskan bahwa NU lahir dari semangat ulama pesantren untuk menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang berpijak pada keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kehidupan

¹⁰ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003)

masyarakat. NU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, melainkan juga sebagai kekuatan sosial yang aktif merespons dinamika kebangsaan. Sikap politik NU digambarkan bersifat akomodatif terhadap kekuasaan, tetapi tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan umat dan ajaran Islam. Dalam konteks Mukhtar Ke-22 tahun 1959, watak ini tampak dalam cara NU menyesuaikan diri terhadap sistem politik baru, yakni Demokrasi Terpimpin, dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai partai Islam tradisional yang berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa secara luas.¹¹

Dalam dimensi kepemimpinan, Antologi NU menegaskan peran penting ulama dan kiai dalam menentukan arah gerak organisasi. Kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi tokoh sentral dalam pengambilan keputusan politik. NU menempatkan ulama sebagai sumber legitimasi moral dan penentu strategi dalam menghadapi perubahan zaman. Pada masa menjelang Mukhtar Ke-22, figur ulama menjadi simbol keseimbangan antara kepentingan agama dan negara. Kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai keulamaan inilah yang memungkinkan NU bertahan dan beradaptasi di tengah situasi politik nasional yang berubah dari sistem parlementer ke sistem terpimpin.¹² *Antologi NU* memberikan dasar teoretis dan historis yang penting untuk memahami dinamika internal dan eksternal Nahdlatul Ulama menjelang dan selama Mukhtar Ke-22 tahun 1959. Buku ini menegaskan bahwa perubahan sikap politik NU bukanlah bentuk oportunisme, melainkan strategi adaptif yang berpijak pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan umat) dan keutuhan negara.

4. Andri Nurjaman “*Dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno 1959–1965.*” (Tesis)

Penelitian Andri memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena keduanya menyoroti periode yang sama, yakni masa transisi politik dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit Presiden 5 Juli

¹¹ H. Solaeman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi Nu Jilid 1*, (Surabaya: Khalista 2007) hlm. 12-14

¹² H. Solaeman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi...* hlm. 33-36

1959. Dalam konteks tersebut, tesis Andri memberikan pijakan penting untuk memahami latar belakang politik dan ideologis NU dalam menghadapi perubahan sistem pemerintahan. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana dukungan NU terhadap Presiden Soekarno tidak hanya bersifat pragmatis, melainkan juga berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan pandangan fiqih politik Ahlussunnah wal Jama'ah. NU menilai bahwa mendukung pemerintahan Soekarno merupakan langkah realistis untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan nilai-nilai Islam tetap berperan dalam kebijakan negara. Relevansi ini menjadi sangat penting dalam konteks penelitian berjudul "*Dinamika Mukhtamar Ke-22 Partai Nahdlatul Ulama di Jakarta 1959*", karena hasil-hasil Mukhtamar tersebut merupakan refleksi langsung dari sikap NU terhadap perubahan sistem politik nasional yang dijelaskan dalam penelitian Andri. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian Andri dan penelitian ini terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian Andri menyoroti dukungan politik NU terhadap kepemimpinan Soekarno dari perspektif elite organisasi di tingkat pusat (PBNU), sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dinamika internal partai dan hasil keputusan Mukhtamar Ke-22 NU di Jakarta sebagai bentuk respon institusional terhadap peralihan politik nasional. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan bagaimana hasil-hasil Mukhtamar Ke-22 mencerminkan sikap resmi NU terhadap sistem Demokrasi Terpimpin, sementara penelitian Andri berfokus pada argumentasi ideologis dan teologis elite NU dalam memberikan dukungan terhadap Soekarno. Oleh karena itu, penelitian Andri berfungsi sebagai landasan konseptual dan sumber pembandingan yang memperkuat kerangka analisis historis penelitian ini.¹³

E. Langkah-langkah Penelitian

Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah adalah kegiatan ilmiah yang disusun secara sistematis untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Tahapan dalam penelitian

¹³ Andri Nurjaman "*Dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno 1959–1965*." (Tesis) hlm. 9-10

sejarah meliputi Heuristik, yaitu proses mencari dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, baik sumber primer seperti arsip, dokumen resmi, dan hasil wawancara, maupun sumber sekunder seperti buku serta penelitian sebelumnya.¹⁴

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber, yaitu proses pengujian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menilai tingkat keasliannya dan kebenaran isi yang dikandungnya. Pada tahap ini, peneliti melakukan dua bentuk kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menelusuri aspek keaslian sumber, seperti siapa pembuatnya, waktu pembuatan, serta kondisi fisiknya. Sementara itu, kritik internal lebih berfokus pada isi sumber, yakni sejauh mana informasi yang terdapat di dalamnya dapat dipercaya dan mendukung keakuratan data penelitian.”¹⁵

Tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan fakta dan data yang telah melewati tahap verifikasi. Pada bagian ini, peneliti berusaha menemukan hubungan logis antara berbagai peristiwa serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Interpretasi tidak hanya menekankan pada penjelasan sebab dan akibat, tetapi juga menempatkan setiap peristiwa dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya pada zamannya. Dengan demikian, interpretasi membantu peneliti menjelaskan dinamika sejarah secara lebih menyeluruh dan bermakna.¹⁶

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses penyusunan hasil penelitian sejarah menjadi bentuk tulisan yang sistematis, kronologis, dan logis. Pada tahap ini, peneliti menyatukan seluruh temuan dan penafsiran ke dalam narasi sejarah yang utuh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Louis Gottschalk, penulisan sejarah tidak hanya berfungsi menyajikan fakta-fakta yang telah ditemukan, tetapi juga menampilkan hasil pemikiran dan interpretasi

¹⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, ed. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 89–130.

¹⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 131–132.

¹⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto; Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45–46.

sejarawan terhadap peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, historiografi menjadi puncak dari keseluruhan proses penelitian sejarah, karena di sinilah fakta dan interpretasi berpadu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lampau.¹⁷

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data – data Sejarah, atau evidensi Sejarah. Menurut Notosusanto Heuristik berasal dari Heuriskein yang berarti *to find* dalam Bahasa Inggris atau tidak hanya menemukan, tetap mencari dahulu dalam Bahasa Indonesia. Pada tahap ini kegiatan heuristik ini di arahkan untuk penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber baik itu lokasi penelitian temuan benda bahkan sumber lisan.¹⁸

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber yang dianggap relevan dengan fokus kajian, yaitu DINAMIKA MUKTAMAR KE-22 PARTAI NAHDLATUL ULAMA DI JAKARTA 1959. Penelitian ini diawali dengan penelusuran berbagai sumber relevan untuk merekonstruksi dinamika Mukhtar Ke-22 Nahdlatul Ulama (NU) secara komprehensif. Tahap pertama dilakukan di Perpustakaan PBNU, tempat peneliti menemukan arsip internal seperti notulen dan laporan tahunan. Langkah selanjutnya dilakukan di Perpustakaan Nasional RI. Peneliti kemudian menelusuri Perpustakaan Batu Api untuk memperoleh sumber pendukung. Tahap akhir dilakukan di DISPUSIPDA Jawa Barat, di mana peneliti mengumpulkan arsip regional guna memperkuat data. Melalui perpaduan sumber primer dan sekunder tersebut, penelitian ini berhasil membangun analisis historis yang menggambarkan pengaruh Mukhtar Ke-22 terhadap struktur dan arah organisasi NU pada dekade berikutnya.

¹⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah...* hlm. 48-49

¹⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung, Pustaka Setia. 2014), hlm. 93.

Diantaranya Sumber-sumber yang ditemukan:

1. Sumber Primer

A. Sumber Tulisan

- a) Notulen Sidang Pleno ke-1 tanggal 13 Desember 1959
- b) Salinan Pidato Bapak K.H Abdul Wahab Chasbullah pada pembukaan sidang Mukhtamar ke-22
- c) Notulen Sidang Pleno ke-I tanggal 14 Desember (Pagi) 1959
- d) Notulen Sidang Pleno ke-III tanggal 14 Desember (Malam) 1959
- e) Notulen Sidang Pleno ke-IV tanggal 15 Desember (Pagi) 1959
- f) Notulen Sidang Pleno ke-V tanggal 15-16 Desember 1959
- g) Notulen Sidang Pleno ke-VI tanggal 16 Desember (Malam) 1959
- h) Notulensi Sidang Pleno ke-VII tanggal 17 Desember 1959
- i) Salinan Pidato PJM Presiden Sukarno dalam resepsi Mukhtamar Ke-22 Partai Nahdlatul Ulama pada malam Jum'at 17 Desember 1959

2. Sumber Sekunder

A. Buku

- a) Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- b) Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997)
- c) Sulaeman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU, jilid 1* (Surabaya: Khalista, 2007)
- d) KH. Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren* (Bandung: PT Alma'arif, 1977)
- e) Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

- f) Sulaeman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU*, jilid 2 (Surabaya: Khalista, 2010)
- g) Deliar Noer, *Gerakan Modern Dalam Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982)
- h) KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2020.

B. Jurnal

- a) Hefner, Robert W. 2009. "Islamic Schools, Social Movements, and Democracy in Indonesia." *World Politics*, 61(1), 184-189.
- b) Bush, Robin. 2009. "Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia." *ISEAS Publishing*, 31(1), 184-189.

2. Kritik

Tahapan kedua dalam metode penelitian sejarah adalah kritik, tujuannya ialah pengujian terhadap sumber-sumber yang akan dijadikan sumber penulisan sejarah. Semua sumber di verifikasi yang di golongkan menjadi dua yang bersifat ekstern dan intern.

A. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern dilakukan untuk mengetahui autensitas atau keaslian sumber. Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah.¹⁹ Dalam hal ini untuk mengetahui keaslian sumber, penulis melakukan beberapa cara diantaranya menyelidiki bentuk sumber, subitasi atau usia sumber, waktu dan tempat pembuatannya diantara sumber-sumbernya.²⁰

- a) Notulen Sidang Pleno I Mu'tamar NU ke-22 ini dapat dinilai sebagai sumber sejarah yang otentik dan kredibel. Dari segi

¹⁹ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

²⁰ M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *"Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar"*, (Depok: Pranada Media), hlm. 217.

kritik ekstern, keasliannya didukung oleh penggunaan ejaan lama Indonesia (seperti "jang", "djam") yang konsisten dengan periode tahun 1959. Otentisitas fisik dokumen juga dibuktikan dari wujudnya yang kini berupa kertas salinan dengan kondisi yang masih terawat dan terbaca dengan jelas. Secara administratif, dokumen salinan ini masih menunjukkan jejak kelengkapan formal seperti adanya kop organisasi, nomor surat, serta rekam cap PBNU dan tanda tangan dari sekretaris sidang. Adapun dari segi rekam jejak (*provenance*), notulen ini ditemukan dan dibaca langsung dari koleksi Perpustakaan PBNU. Sebagai dokumen resmi organisasi, catatan ini merupakan sumber primer yang dibuat segera setelah peristiwa berlangsung, sehingga tingkat kepercayaan terhadap informasinya tinggi.

- b) Dokumen ini menunjukkan ciri-ciri keaslian yang kuat melalui proses kritik ekstern. Selain konsistensi penggunaan ejaan lama era 1959 seperti kata "jang", "sjukur", "chubatul", dan "djalanja", keaslian fisiknya terkonfirmasi dari wujud kertas salinan yang kondisinya masih terawat dan teksnya terbaca jelas. Salinan pidato ini dilengkapi dengan jejak kelengkapan formal keorganisasian seperti kop surat, nomor dokumen, stempel, serta tanda tangan. Dokumen historis ini merupakan bagian dari koleksi Perpustakaan PBNU yang diakses dengan cara ditelusuri dan dibaca secara langsung di lokasi. Sebagai salinan pidato yang disampaikan langsung oleh tokoh sentral NU (K.H. Abdul Wahab Chasbullah) pada acara resmi, dokumen ini memiliki nilai tinggi sebagai sumber primer. Secara keseluruhan, dokumen ini cukup andal untuk memahami pandangan dan pesan tokoh pendiri NU kepada peserta mu'tamar, meskipun kehati-hatian tetap

diperlukan mengingat proses penyalinan yang mungkin mempengaruhi bentuk penyajiannya.

- c) Notulen Sidang Pleno II Mu'tamar NU ke-22 ini dapat dinilai sebagai sumber sejarah yang otentik dan memiliki kredibilitas tinggi. Melalui tinjauan kritik ekstern, wujud fisik arsip ini berupa kertas salinan yang masih terawat dan terbaca dengan baik. Dokumen resmi organisasi ini mencantumkan dengan jelas waktu pelaksanaan (14 Desember 1959), susunan pimpinan sidang (K.H.M. Dachlan, H.A. Sjahri), dan jumlah cabang yang hadir (169), serta memuat atribut legalitas yang turut tersalin seperti kop PBNU, nomor surat, stempel, dan tanda tangan pimpinan sidang. Dokumen ini bersumber dari koleksi Perpustakaan PBNU dan didapatkan melalui penelusuran serta pembacaan secara langsung. Sumber primer seperti ini sangat berharga karena dibuat pada saat peristiwa terjadi atau sesaat setelahnya, langsung oleh pelaku atau pencatat resmi.
- d) Notulen Sidang III Mu'tamar NU ke-22 ini merupakan sumber sejarah yang otentik dan andal. Berdasarkan evaluasi kritik ekstern, keaslian dokumen tidak hanya nampak dari gaya bahasanya, melainkan juga karakteristik fisiknya yang kini berupa kertas salinan dengan kondisi pelestarian yang terawat dan dapat dibaca dengan jelas. Dokumen pencatatan resmi ini memuat jejak nomor surat, kop PBNU, serta disahkan melalui rekam cap dan tanda tangan pimpinan sidang. Arsip yang mencatat waktu, pimpinan sidang, dan proses pengambilan keputusan ini tersimpan dan dibaca langsung dari perbendaharaan koleksi Perpustakaan PBNU. Kredibilitasnya sebagai sumber primer sangat tinggi karena dibuat untuk keperluan dokumentasi internal organisasi yang formal, sehingga kecil kemungkinan isinya diputarbalikkan.

- e) Notulen Sidang IV Mu'tamar NU ke-22 ini dapat dinilai sebagai sumber sejarah yang otentik dan sangat berharga. Dokumen ini menunjukkan keaslian yang kuat dengan ciri khas ejaan lama Indonesia ("jang", "djam", "chusus", "atjara") yang sesuai dengan periode 1959. Uji kritik ekstern pada aspek material mengkonfirmasi bahwa naskah ini berupa kertas salinan yang kondisinya terawat dan masih terbaca dengan baik. Catatan resmi ini teridentifikasi dengan jelas melalui keberadaan jejak nomor dokumen dan kop PBNU, serta mendapatkan legalisasi berupa cap organisasi beserta tanda tangan pengesahan yang turut tersalin. Dokumen ini ditemukan dan dibaca secara langsung dari koleksi Perpustakaan PBNU. Sebagai catatan resmi yang mendokumentasikan proses musyawarah, tanggapan cabang terhadap kinerja pengurus pusat, dan isu-isu internal, notulen ini merupakan sumber primer yang kredibel.
- f) Notulen Sidang V Mu'tamar NU ke-22 ini merupakan sumber sejarah yang otentik dan kredibel. Secara kritik ekstern, keotentikan dokumen ini terverifikasi dari material fisiknya yang berupa dokumen kertas salinan dengan kondisi yang terawat dan teks yang masih jelas terbaca. Legalitas formal salinan dokumen didukung oleh ketersediaan jejak nomor surat, kop dan cap PBNU, serta tanda tangan pimpinan atau sekretaris sidang. Arsip ini adalah bagian dari koleksi Perpustakaan PBNU yang ditelusuri dan dibaca secara langsung. Sebagai catatan primer yang mendokumentasikan jalannya sidang pleno, daftar cabang yang hadir, serta pandangan dan usulan mereka, kredibilitasnya sangat tinggi; dokumen ini dibuat untuk tujuan dokumentasi internal yang formal sehingga akurat dalam merekam aspirasi akar rumput NU.

- g) Notulen Sidang VI Mu'tamar NU ke-22 ini merupakan sumber sejarah yang otentik dan sangat penting. Kritik ekstern pada dokumen ini menegaskan keasliannya tidak hanya melalui penggunaan ragam bahasa 1950-an, tetapi juga wujud material berupa kertas salinan dengan tingkat kelestarian yang terawat dan masih bisa dibaca dengan jelas. Keabsahan salinan dokumen ini turut diperkuat oleh hadirnya jejak nomor dokumen, kelengkapan kop PBNU, stempel, serta tanda tangan pihak berwenang. Dokumen primer ini berasal dari koleksi Perpustakaan PBNU dan diakses dengan cara dibaca langsung di lokasi. Sebagai catatan yang mendokumentasikan pidato program partai dan usulan struktur organisasi, sumber ini sangat andal dan krusial untuk memahami respons, penyesuaian strategi, dan reposisi politik NU dalam menghadapi perubahan ketatanegaraan Indonesia di akhir dekade 1950-an.
- h) Notulen Sidang VII Mu'tamar NU ke-22 ini merupakan sumber sejarah yang otentik dan sangat bernilai. Melalui penerapan kritik ekstern, validitas fisik dokumen dibuktikan dengan wujud kertas salinan yang saat ini berada dalam kondisi terawat dan terbaca jelas. Atribut administratif yang menyertai salinannya meliputi jejak kelengkapan kop PBNU, nomor pencatatan dokumen, stempel organisasi, serta keabsahan tanda tangan pengesahan. Secara rekam jejak, arsip ini tersimpan, ditemukan, dan dibaca langsung dari koleksi Perpustakaan PBNU. Sebagai catatan resmi yang mendokumentasikan momen krusial berupa penyerahan kembali mandat oleh PBNU lama kepada mu'tamar, dokumen ini berstatus sebagai sumber primer yang validitasnya tidak diragukan.

- i) Pidato Presiden Soekarno dalam resepsi Mu'tamar NU ke-22 ini merupakan sumber sejarah yang otentik dan sangat berharga. Analisis kritik ekstern terhadap naskah pidato ini mengkonfirmasi orisinalitasnya melalui ejaan yang relevan dengan tahun 1959, serta medium fisiknya yang berupa kertas salinan dengan kondisi pelestarian yang masih terawat dan dapat dibaca dengan baik. Otentisitas kenegaraan/kepemimpinan pada salinan dokumen ini ditandai dengan keberadaan jejak nomor dokumen, kop surat resmi panitia penyelenggara, stempel, serta tanda tangan pihak terkait. Teks pidato ini didapatkan dari koleksi Perpustakaan PBNU dan diakses dengan cara ditelusuri serta dibaca secara langsung. Sebagai teks pidato yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara, sumber primer ini merekam dengan tajam relasi strategis antara kekuasaan Negara dan Nahdlatul Ulama di ambang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

B. Kritik Intern

Tahap kritik intern bertujuan untuk menilai tingkat keaslian sumber yang telah diperoleh, dengan fokus pada validitas dan kebenaran sumber tersebut dalam penelitian. Proses ini memastikan bahwa sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Di sisi lain, kritik intern lebih berfokus pada aspek "dalam," yakni isi kesaksian dari sumber tersebut. Peneliti harus menentukan apakah sumber tersebut pantas digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Langkah pertama dalam kritik intern adalah mengidentifikasi karakteristik sumber yang telah dikumpulkan. Langkah kedua melibatkan penilaian terhadap penulis sumber, karena penulis merupakan pihak yang memberikan informasi terkait. Langkah ketiga adalah membandingkan kesaksian dari berbagai sumber yang berbeda

dan tidak saling berhubungan untuk mendapatkan hasil yang objektif.²¹ Cara kerja pada kritik intern ini dilakukan untuk menemukan kesaksian sumber yang dapat diandalkan (reliable) atau tidak berdasarkan berdasarkan beberapa hal, di antaranya;

1. Mengidentifikasi isi sumbernya apakah sumber tersebut resmi atau bukan.
2. Kredibilitas saksi harus ditegakkan dengan menunjukkan kompetensi verasitas (kebenaran) apakah saksi mempunyai kapasitas untuk menyampaikan itu atau tidak dan apakah saksi menyampaikannya dengan jujur atau tidak.
3. Memastikan sumber relevan dan akurat dengan permasalahan yang diteliti.
4. Memahami secara mendalam maksud dari informasi yang diberikan oleh saksi maupun informasi yang tersaji pada sumber tertulis.

Adapun Kritik Intern dari beberapa sumber yang penulis dapatkan sebagai berikut:

- a) Notulen Sidang Pembukaan Mu'tamar NU ke-22 tahun 1959 menggambarkan upaya Nahdlatul Ulama memadukan identitas keislaman dengan penyelenggaraan organisasi yang tertib melalui pembacaan Al-Qur'an, penggunaan bahasa Arab, dan susunan acara yang sistematis. Sebagai dokumen resmi PBNU, notulen ini merepresentasikan cara organisasi menampilkan identitasnya di hadapan peserta Mu'tamar. Apabila dibandingkan dengan pembahasan B.J. Boland dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Nahdlatul Ulama dipahami sebagai organisasi Islam yang berupaya mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus

²¹ M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *"Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar."* (Depok: Kencana (2014) hlm. 104.

menyesuaikan diri dengan perkembangan politik Indonesia pascakemerdekaan. Oleh karena itu, isi dokumen ini dapat dipahami sebagai representasi resmi organisasi, meskipun tetap berpotensi memuat bias institusional dalam menggambarkan jalannya acara.

- b) Pidato K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam pembukaan Mu'tamar mencerminkan pandangan pimpinan NU mengenai hubungan antara ajaran Islam dan kehidupan berbangsa. Sebagai pidato resmi Rois 'Aam, dokumen ini memperlihatkan arah pemikiran yang hendak dibangun kepada peserta Mu'tamar. Hal tersebut sejalan dengan analisis Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* yang menjelaskan bahwa argumentasi keagamaan para ulama NU merupakan bagian dari ijtihad politik untuk menjelaskan sikap organisasi dalam menghadapi perubahan politik nasional. Dengan demikian, pidato ini tidak hanya menggambarkan pandangan pribadi K.H. Abdul Wahab Chasbullah, tetapi juga mencerminkan orientasi politik Nahdlatul Ulama pada masa tersebut.
- c) Notulen Sidang Pleno II Mu'tamar NU ke-22 memperlihatkan proses organisasi yang sistematis melalui pencatatan jumlah cabang yang hadir serta pembagian laporan organisasi dan politik secara terstruktur. Sebagai dokumen resmi PBNU, informasi tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme organisasi menurut perspektif penyelenggara. Pembahasan ini sejalan dengan Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* yang menunjukkan bahwa setelah menjadi partai politik, NU berupaya memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat cabang sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, notulen ini memiliki nilai

penting dalam menjelaskan mekanisme organisasi NU, meskipun tetap perlu dipahami sebagai arsip internal yang berpotensi menonjolkan keberhasilan organisasi.

- d) Notulen Sidang Pleno III Mu'tamar NU ke-22 mendokumentasikan pembahasan dan pengesahan tata tertib Mu'tamar melalui mekanisme musyawarah. Sebagai dokumen resmi organisasi, notulen ini lebih menampilkan hasil pembahasan yang telah disepakati daripada keseluruhan dinamika perdebatan yang terjadi selama persidangan. Hingga penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan karya sejarah yang secara khusus membahas jalannya Sidang Pleno III Mu'tamar NU ke-22 sehingga verifikasi silang terhadap proses musyawarah belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, interpretasi terhadap dokumen ini terutama didasarkan pada arsip internal PBNU dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya bias organisasi. Keterbatasan tersebut menjadi ruang bagi penelitian selanjutnya.
- e) Notulen Sidang Pleno IV Mu'tamar NU ke-22 memuat berbagai tanggapan dan kritik dari cabang terhadap kebijakan PBNU, termasuk usulan mengenai arah perjuangan organisasi. Kehadiran berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa Mu'tamar menjadi ruang penyampaian aspirasi dari cabang-cabang. Kondisi tersebut sejalan dengan uraian Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama yang menunjukkan bahwa dinamika perbedaan pandangan merupakan bagian dari perkembangan organisasi NU pada masa menjadi partai politik. Oleh karena itu, notulen ini penting untuk memahami dinamika internal organisasi, meskipun tetap merupakan representasi resmi PBNU.

- f) Notulen Sidang Pleno V memperlihatkan adanya variasi pandangan dari cabang-cabang terhadap kebijakan PBNU, baik yang bersifat mendukung maupun memberikan kritik. Sebagai dokumen resmi organisasi, notulen ini merekam hasil pembahasan yang dianggap penting oleh penyelenggara. Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* menjelaskan bahwa hubungan antara pengurus pusat dan cabang merupakan salah satu dinamika penting dalam perkembangan politik NU pada dekade 1950-an. Oleh karena itu, dokumen ini dapat digunakan untuk memahami proses musyawarah internal organisasi, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya penekanan terhadap hasil akhir dibandingkan keseluruhan dinamika persidangan.
- g) Notulen Sidang Pleno VI memuat prasaran H. Zainul Arifin mengenai penerimaan Demokrasi Terpimpin dengan penafsiran yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Sebagai dokumen resmi PBNU, rumusan tersebut mencerminkan argumentasi organisasi dalam menjelaskan sikap politiknya terhadap perubahan sistem ketatanegaraan. Herbert Feith dalam *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* menjelaskan bahwa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 partai-partai politik, termasuk Nahdlatul Ulama, melakukan penyesuaian terhadap konfigurasi politik baru pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, notulen ini memperlihatkan bagaimana NU merumuskan dasar-dasar penerimaan tersebut menurut perspektif organisasinya.
- h) Notulen Sidang Pleno VII mendokumentasikan penyerahan kembali mandat kepengurusan PBNU kepada forum Mu'tamar sebagai bagian dari mekanisme organisasi.

Sebagai dokumen resmi, notulen ini memberikan gambaran mengenai proses pergantian kepemimpinan menurut perspektif penyelenggara. Hingga penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan karya sejarah yang secara khusus membahas dinamika Sidang Pleno VII Mu'tamar NU ke-22 sehingga verifikasi silang terhadap proses tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dokumen ini tetap dipahami sebagai sumber primer yang penting, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya bias sebagai arsip resmi organisasi.

- i) Pidato Presiden Soekarno dalam resepsi Mu'tamar NU ke-22 menunjukkan hubungan antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama pada masa awal Demokrasi Terpimpin. Sebagai pidato resmi kepala negara yang dimuat dalam dokumen Mu'tamar, naskah ini merepresentasikan pandangan pemerintah terhadap posisi NU dalam kehidupan politik nasional. Hal tersebut sejalan dengan pembahasan Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965 yang menjelaskan berkembangnya hubungan politik antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah setelah memasuki era Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu, pidato ini tidak hanya dapat dipahami sebagai sambutan seremonial, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan politik antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama pada akhir dekade 1950-an.

3. Interpretasi

Pendekatan Fiqih Siyasah menjelaskan bahwa aktivitas politik dalam Islam merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut Muhammad Iqbal, fiqih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang mengkaji hubungan antara kekuasaan, pemerintahan, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan syariat (*maqāṣid al-*

syarī'ah). Dalam pelaksanaannya, setiap kebijakan politik harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syūrā*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tanggung jawab pemimpin terhadap umat.²²

Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, fiqh siyasah memandang bahwa pengambilan keputusan politik harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah serta mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dalam perspektif Muhammad Iqbal, perubahan kebijakan politik dimungkinkan selama bertujuan menjaga stabilitas masyarakat, mewujudkan keadilan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²³

Dalam konteks penelitian ini, teori Fiqh Siyasah digunakan untuk menganalisis dinamika Mukhtar ke-22 Partai Nahdlatul Ulama di Jakarta tahun 1959 sebagai proses ijtihad politik organisasi dalam merespons perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa transisi dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin. Mukhtar ke-22 tidak hanya menjadi forum permusyawaratan organisasi, tetapi juga menjadi wadah bagi Nahdlatul Ulama dalam merumuskan sikap politik terhadap berbagai persoalan kenegaraan berdasarkan pertimbangan syariat, kemaslahatan umat, dan kepentingan bangsa. Keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dalam Mukhtar ke-22, seperti pembahasan mengenai Demokrasi Terpimpin, hubungan dengan pemerintah, serta arah perjuangan Partai Nahdlatul Ulama, dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *syūrā* dan *maslahah* dalam fiqh siyasah. Dalam kerangka teori ini, sikap politik Nahdlatul Ulama tidak dipandang semata-mata sebagai strategi mempertahankan kepentingan organisasi, tetapi sebagai hasil ijtihad politik yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat Islam sekaligus mempertahankan stabilitas kehidupan berbangsa di tengah perubahan konfigurasi politik nasional.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3–15.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 67–90.

Dengan demikian, teori Fiqih Siyasah membantu menjelaskan bahwa dinamika Mukhtamar ke-22 Partai Nahdlatul Ulama merupakan proses perumusan kebijakan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam melalui mekanisme musyawarah dan pertimbangan kemaslahatan. Teori ini memberikan landasan analitis bahwa setiap keputusan politik yang dihasilkan Nahdlatul Ulama tidak hanya memiliki dimensi organisatoris, tetapi juga mencerminkan upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan realitas politik Indonesia pada tahun 1959. Sejalan dengan pandangan Muhammad Iqbal, kebijakan politik dalam Islam harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat, keadilan, serta terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis sesuai dengan tujuan syariat.²⁴

4. Historiografi

Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi memiliki arti deskripsi/penulisan. Kata Historia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kata “historia” dipakai untuk pemaparan mengenai tindakan - tindakan manusia yang bersifat kronologis terjadi di masa lampau. Penulisan sejarah adalah puncak segala sesuatu. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah sebagai historie-recite, sejarah sebagaimana dikisahkan yang mencoba mengangkat dan memahami historie - realitie, sejarah sebagaimana terjadinya. Dan hasil penulisan inilah yang disebut historiografi.²⁵

Dalam tahapan historiografi ini penulis akan menggambarkan secara garis besar tentang Dinamika Mukhtamar ke-22 Partai Nahdlatul Ulama di Jakarta 1959:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi)

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 145–168.

²⁵ Kartodirdjo, “*Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*” (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 97.

BAB II : Pada bagian ini penulis membahas mengenai keadaan Indonesia pada masa peralihan sistem demokrasi, serta membahas tentang teknis pelaksanaan Mukhtar ke-22 Nahdlatul Ulama tahun 1959

BAB III : Pada bagian ini penulis membahas mengenai hasil keputusan dari Mukhtar ke-22 Nahdlatul Ulama 1959

BAB IV : pada bab terakhir penulis membahas tentang kesimpulan hasil penelitian mengenai Dinamika Mukhtar ke-22 Nahdlatul Ulama 1959

